



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Membangun Desa Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan melalui Dialog Komunitas

Penulis

Asy Khofsah¹, Sarwititi Sarwoprasodjo¹, Siti Amanah¹

¹ Program Studi Pascasarjana Komunikasi Pembangunan, IPB University, Bogor Indonesia

Membangun Desa Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan melalui Dialog Komunitas

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pembangunan desa kelautan dan perikanan tidak menempatkan dialog partisipatif sebagai skema inti pembangunan sehingga proses deliberasi gagal membangun komitmen kolektif.
- 2) Indikator capaian penyuluhan terbatas pada *output* fisik dan teknis, sementara kualitas dialog, dan penguatan sosial tidak dibahas.
- 3) Kelompok dibentuk berdasarkan target administratif dan mengesampingkan kesediaan sukarela sehingga kelembagaannya rapuh.

Ringkasan

Pembangunan desa kelautan dan perikanan di Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan dalam peningkatan produksi, sarana prasarana, dan jumlah kelompok usaha, namun keberlanjutan program masih rapuh karena lemahnya kemandirian masyarakat. Banyak program berhenti setelah pemberian bantuan dan pelaksanaan pendampingan awal, tanpa memastikan kekuatan aksi kolektif masyarakat pasca intervensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa kelautan dan perikanan belum sepenuhnya memperhatikan keadaan sosial yang memungkinkan masyarakat memahami persoalan bersama, membangun kepercayaan, dan menyepakati tindakan kolektif. *Policy brief* ini menegaskan bahwa dialog komunitas yang *deliberative*, siklikal dan iteratif merupakan kunci pembangunan yang krusial, namun selama ini masih terpinggirkan. Temuan empiris menunjukkan bahwa intensitas dialog komunitas dan kekuatan modal sosial berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan aksi kolektif, efektivitas kelembagaan kelompok, serta dampak ekonomi dan sosial program. Dialog yang bersifat formalistik dan administratif cenderung melahirkan partisipasi semu dan melemahkan kepercayaan antaraktor. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa kelautan dan perikanan perlu menempatkan komunikasi partisipatif, penguatan dialog komunitas, dan pengelolaan modal sosial sebagai komponen inti dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.

Kata kunci : aksi kolektif, desa kelautan dan perikanan, dialog komunitas, modal sosial

Diterima: 19 Des 2025
Direvisi: 03 Jun 2026
Disetujui: 11 Jun 2026
Publikasi: 18 Jun 2026

Sitasi:

Khofsah, A., Sarwoprasodjo, S., & Amanah, S. 2026. Membangun Desa Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan melalui Dialog Komunitas. *Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika*, 8(2), 1639-1643.



© 2026 The Author(s).
Published by IPB
University.

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi tantangan strategis dalam agenda pembangunan nasional “Indonesia Emas 2045”. Bank Dunia mencatat 60,3% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (US\$6,85/hari), jauh lebih tinggi dari pada angka kemiskinan nasional menurut BPS yakni sebesar 8,57% (BPS, 2024). Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan perikanan dan kelautan yang melimpah, namun demikian 25% penduduk miskin di Indonesia berasal dari sektor ini (Kementerian Sekretariat Negara, 2019). Artinya, pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan berbagai program pembangunan dan pengembangan masyarakat. Akan tetapi sebagian besar program tersebut belum mencapai target yang diharapkan karena masih diterapkan melalui pendekatan *top-down* (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Nikijuluw, 2022; Satria, 2021). Sejumlah program berhenti pada fase bantuan dan pendampingan awal, bahkan dalam beberapa kasus memunculkan ketergantungan baru (Muslim, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan desa kelautan dan perikanan tidak hanya terletak pada aspek teknis atau permodalan, melainkan pada lemahnya proses penguatan sosial yang membangun kerja sama, kepercayaan, dan komitmen kolektif masyarakat.

Salah satu aspek krusial yang kerap terpinggirkan dalam desain kebijakan adalah komunikasi partisipatif. Komunikasi masih dipahami sebagai sosialisasi program, bukan sebagai proses dialog deliberatif yang memungkinkan masyarakat merumuskan masalah dan solusi bersama yang berkelanjutan. Jika pendekatan kebijakan desa kelautan dan perikanan saat ini tidak segera dikoreksi, Indonesia menghadapi beberapa risiko strategis, yakni pemborosan anggaran akibat rendahnya keberlanjutan program, terhambatnya produktivitas dan daya saing sektor perikanan, serta

gagalnya penyerapan bonus demografi perdesaan. Pada jangka panjang, ketidakhadiran dialog partisipatif dan pengabaian modal sosial akan melemahkan pembangunan desa kelautan dan perikanan, serta menghambat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sosial perdesaan.

Dialog Komunitas: dari Forum Administratif ke Proses Deliberatif

Pada pembangunan desa kelautan dan perikanan, dialog komunitas umumnya diwujudkan melalui pertemuan kelompok, musyawarah, dan sosialisasi program. Namun, melalui implementasi *Smart Fisheries Village* (SFV) di Desa Kawali dan Desa Bangsring menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi tidak ditentukan oleh keberadaan forum dialog dan kehadiran fisik semata, melainkan oleh kualitas dialog yang dilaksanakan. *Empowerment* tidak hanya berarti keterlibatan fisik masyarakat, tetapi kemampuan untuk mempengaruhi keputusan, mengontrol sumber daya, dan menentukan arah pembangunan mereka sendiri (Servaes, 2020).

Analisis SEM-PLS menunjukkan nilai p-value dialog komunitas terhadap aksi kolektif adalah $p = 0,000$ dengan arah yang positif. Temuan ini menegaskan bahwa dialog bukan sekadar aktivitas prosedural, melainkan variabel kunci yang memengaruhi aksi kolektif masyarakat desa kelautan dan perikanan. Temuan kualitatif juga memperkuat hasil tersebut. Penyuluh perikanan menjelaskan bahwa dialog komunitas berkembang melalui ruang dialog lokal seperti rumasa (rumpaka Sabtu malam) dan arisan. Forum ini berfungsi sebagai arena deliberatif tempat masyarakat merundingkan persoalan bersama. Melalui dialog informal, masyarakat membangun kesepahaman, menyelaraskan kepentingan, dan menyepakati rencana aksi kolektif sebelum keputusan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Keterangan wakil ketua kelompok menunjukkan bahwa dialog yang dikelola terlalu formal justru melahirkan tekanan sosial dan konsensus semu sehingga jarang tercapai mufakat dan komitmen masyarakat.

Pada tataran kebijakan, temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan formal tidak efektif untuk pembangunan desa kelautan dan perikanan. Kebijakan perlu bergeser dari sekadar mewajibkan pertemuan rutin menuju perancangan dialog komunitas yang deliberatif, inklusif, dan reflektif, sehingga dialog benar-benar berfungsi sebagai mekanisme transformasi kebijakan menjadi aksi kolektif masyarakat. Temuan ini juga relevan dengan kebijakan pembentukan kelompok usaha perikanan. Kelompok yang dibentuk berdasarkan target administratif cenderung menghasilkan partisipasi transaksional dan rapuh, sementara kelompok yang tumbuh dari proses dialog dan kesepahaman bersama menunjukkan daya tahan yang lebih tinggi karena didukung oleh komitmen internal.

Modal Sosial sebagai Infrastruktur Aksi Kolektif

Keberhasilan aksi kolektif juga dipengaruhi oleh modal sosial. Menurut (Ostrom, 2000) modal sosial menyediakan landasan kepercayaan dan kerangka interaksi yang penting untuk aksi kolektif. Analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh signifikan terhadap terbentuknya aksi kolektif ($p = 0,000$). Artinya kepercayaan, norma gotong royong, dan jejaring sosial merupakan bagian penting dari pembangunan struktur sosial. Modal sosial tumbuh dari hubungan kekerabatan, kesamaan budaya, serta praktik keseharian seperti sehingga memperkuat musyawarah dan kerja sama. Hal ini dikarenakan modal sosial menumbuhkan kepedulian dan solidaritas yang tinggi sebagaimana dijelaskan (Jones & Woolcock, 2007).

Namun, temuan lapang juga menunjukkan bahwa modal sosial bersifat rentan. Beberapa kelompok terpaksa dinonaktifkan karena sebagian besar anggotanya memilih mundur menjadi anggota kelompok. Alasannya adalah karena konflik internal, rendahnya transparansi pengelolaan keuangan, dan melemahnya kepercayaan terhadap pengurus yang gagal dimediasi oleh Gabungan kelompok perikanan (Gapokkan). Fakta ini menunjukkan bahwa

intervensi teknis dan kelembagaan formal tidak akan berkelanjutan ketika kepercayaan sosial menurun.

Peran Penyuluh dan Negara dalam Mengelola Proses Sosial

Peran penyuluh kelautan dan perikanan terbukti strategis dalam menjaga kualitas dialog dan modal sosial. Analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa peran penyuluh berpengaruh signifikan terhadap dialog komunitas ($p=0,035$). Secara kualitatif, penyuluh berkontribusi melalui fasilitasi dialog, mediasi konflik, dan pendampingan penyusunan rencana aksi pasca dialog. Namun, kebijakan penyuluhan nasional yang masih menilai kinerja penyuluh berbasis output teknis dan administratif belum sepenuhnya mengakomodasi fungsi strategis ini. Akibatnya, potensi penyuluh sebagai katalis pembangunan berkelanjutan belum dioptimalkan secara sistematis dalam desain kebijakan desa kelautan dan perikanan.

Pada ranah kebijakan nasional, temuan ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara desain sistem penyuluhan kelautan dan perikanan dengan dinamika empiris di lapangan. Indikator kinerja penyuluhan masih berbasis capaian output fisik sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi fungsi strategis penyuluh sebagai katalis perubahan sosial. Akibatnya, penyuluh sering terjebak dalam beban administratif, sementara perannya dalam membangun dialog partisipatif, kepercayaan, dan resolusi konflik sosial tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemangku kebijakan perlu mengkaji ulang kebijakan penyuluhan dan melegitimasi dialog partisipatif, modal sosial dan aksi kolektif sebagai bagian dari proses pembangunan.

Rekomendasi

Kebijakan pembangunan desa kelautan dan perikanan perlu dikaji ulang karena pendekatan yang berfokus pada output teknis dan target administratif terbukti tidak cukup membangun kemandirian dan keberlanjutan. Pendekatan pembangunan model lama berisiko memperpanjang pemborosan anggaran, melemahkan aksi kolektif, serta menggagalkan manfaat bonus demografi. Kebijakan

perlu menempatkan dialog komunitas sebagai fondasi, agar meningkatkan efektivitas program dan dampak jangka panjang.

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menetapkan dialog komunitas deliberatif sebagai tahapan wajib dalam setiap siklus perencanaan, pendampingan, dan evaluasi program desa kelautan dan perikanan. Kedua, perlu dikembangkan indikator kualitas komunikasi partisipatif, kekuatan modal sosial dan pelaksanaan aksi kolektif setidaknya pada tahap perencanaan dan evaluasi program. Ketiga, indikator kinerja penyuluh perikanan perlu direformulasi dengan menilai kemampuan fasilitasi dialog, pengelolaan konflik, dan penguatan kelembagaan sosial, yang didukung oleh pelatihan berkelanjutan. Keempat, kebijakan pembentukan kelompok usaha perikanan harus berbasis kebutuhan nyata dan partisipasi organik masyarakat, bukan sekadar pemenuhan target program.

Kesimpulan

Pendekatan kebijakan desa kelautan dan perikanan yang selama ini bertumpu pada penyediaan input, capaian teknis, dan kepatuhan administratif memiliki keterbatasan mendasar karena mengasumsikan bahwa partisipasi dan kerja sama sosial akan terbentuk secara otomatis. Temuan empiris menunjukkan bahwa asumsi ini keliru. Dialog komunitas yang bersifat formalistik dan pembentukan kelompok berbasis target justru melemahkan rasa memiliki, mengikis kepercayaan, dan menghasilkan aksi kolektif yang rapuh.

Urgensi peninjauan Kembali kebijakan terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa investasi negara benar-benar menghasilkan dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Penyesuaian kebijakan tidak terletak pada penambahan program baru, melainkan pada pergeseran paradigma dari pendekatan administratif menuju penguatan masyarakat melalui dialog deliberatif, pengelolaan modal sosial, dan peran penyuluh sebagai fasilitator proses. Tujuannya agar mengurangi risiko kegagalan dan pemborosan biaya sosial dan ekonomi yang semakin besar.

Daftar Pustaka

- BPS. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgzlzl=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>
- Damayanti, R. A., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Jones, V. N., & Woolcock, M. (2007). *Using Mixed Methods to Assess Social Capital in Low Income Countries: Practical Guide* (Number December). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1205165#
- Kementerian Sekretariat Negara. (2019, April). *Pemerintah Luncurkan Proyek Percontohan Program Satu Juta Nelayan Berbasis Teknologi Digital di Sukabumi*. https://www.setneg.go.id/baca/index/siaran_pers_kemenko_bidang_kemaritiman_pemerintah_luncurkan_proyek_percontohan_program_satu_juta_nelayan_berbasis_teknologi_digital_di_sukabumi?utm_source=chatgpt.com
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79–87. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.14524>
- Nikijuluw, V. P. H. (2022). *Blue economy dan masa depan ekonomi Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Ostrom, E. (2000). Collective Action and the Evolution of Social Norms. *Journal of Economic Perspectives*, 14(3), 137–158. <https://doi.org/10.1257/jep.14.3.137>
- Satria, A. (2021). *Pengelolaan sumber daya perikanan: Perspektif sosial-ekologi*. IPB Press.

Servaes, J. (2020). *Handbook of Communication for Development and Social Change* (J. Servaes, Ed.). Springer Singapore.

<https://doi.org/10.1007/978-981-15-2014-3>

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Asy Khofsah, merupakan mahasiswa pasca sarjana magister komunikasi pembangunan di IPB University. Asy aktif melakukan penelitian di bidang Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (Sosial Humaniora) dengan fokus komunikasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan analisis kebijakan desa. Latar belakang akademiknya meliputi S1 Sains Komunikasi.

(Corresponding Author)

Email: khofsah_asy@apps.ipb.ac.id



Sarwititi Sarwoprasodjo, merupakan Ketua Program Studi Pascasarjana Komunikasi Pembangunan IPB University dengan kepakaran utama pada komunikasi pembangunan, komunikasi partisipatif, dan pengelolaan proses sosial dalam pembangunan perdesaan. Memiliki pengalaman panjang dalam penelitian, pendampingan kebijakan, serta pengabdian masyarakat di bidang pemberdayaan komunitas, penyuluhan, dan komunikasi perubahan sosial. Aktif menulis dan mempublikasikan karya ilmiah nasional maupun internasional terkait komunikasi pembangunan dan aksi kolektif masyarakat.



Siti Amanah, merupakan dosen pengajar Program Studi Pascasarjana Komunikasi Pembangunan IPB University dengan kepakaran pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, dan komunikasi pembangunan. Beliau ber pengalaman luas dalam kajian kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan perdesaan. Terlibat aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas komunitas serta peran komunikasi dalam pembangunan berkelanjutan. Kepakarannya memperkuat analisis kebijakan berbasis proses sosial dan partisipatif.

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680